

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI INTERNET DAN WEB GOVERNMENT BAGI APARATUR DESA

Agus Suryana¹, Andreas Andoyo², Muhamad Muslihudin³

^{1,2,3}Prodi Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung

^{1,2,3}Jl. Wisma Rini No. 09 pringsewu Lampung

E-mail : agusuryana@gmail.com, aandoyo@gmail.com, muslih.udin@ymail.com

Abstrak

Teknologi merupakan bentuk perkembangan jaman. Seluruh manusia di muka bumi dipaksa untuk membuka mata pada perubahan teknologi yang sedemikian cepat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Inpres no 3 tahun 2003 merumuskan bahwa tujuan pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi bagi aparatur Pekon di Kabupaten Pringsewu ini akan memberikan tambahan pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat implementasi e-government.

Kata Kunci: Web Government, Informasi Publik, Desa, Pringsewu

Abstract

Technology is a form of development. All humans on earth are forced to open their eyes to technological changes that are so fast and affect all aspects of life. Inpres no 3 of 2003 formulated that the goal of e-Government development is an effort to develop (using) electronic-based governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. Training on the use of Information Technology for Pekon apparatus in Pringsewu Regency will provide additional knowledge regarding the functions and benefits of implementing e-government.

Keywords: Web Government, Public Information, Village, Pringsewu

I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Akibat menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintahan desa. Namun di balik keterbatasan tersebut, muncul desa-desa yang mampu menggunakan dan memanfaatkan TIK guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, sehingga mampu meningkatkan pembangunan desa tersebut. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet,

serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa.

Kebijakan dan program-program pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek bukan sebagai subjek, program-program pemanfaatan TIK hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Oleh karena itu, dengan munculnya gerakan dari desa yang dapat menyelenggarakan pemeritahan secara baik dan mandiri, yang didukung dengan pemanfaatan TIK, menjadi pelajaran bahwa inisiatif tersebut dapat dilakukan dari bawah. Dengan demikian desa tersebut mampu melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan desa itu sendiri. Di antara pemanfaatan TIK oleh desa misalnya: (1) Penggunaan piranti lunak sumber terbuka dalam kegiatan operasional (Mustika, 2011); (2) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan membangun jejaring antar desa (Desa Madusari, 2013); (3) Pembuatan website/blog guna keperluan diseminasi informasi kegiatan yang dilakukan oleh warga maupun aparat desa, meningkatkan penyebaran informasi sampai melewati batas wilayah (Gerakan Desa Membangun, 2014); (4) Penggunaan sistem informasi untuk melaksanakan pelayanan publik, memperkenalkan potensi desa maupun menyosialisasikan pembangunan desa (Jahja, 2012). Hal-hal tersebut dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kemandirian di tingkat desa.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu Lampung, telah memanfaatkan TIK guna mendukung pembangunan dan kemandirian desa tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak di antaranya, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI Khususnya Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa, desa-desa lain yang ingin menggunakan maupun memanfaatkan TIK sesuai dengan kebutuhan desa dalam kerangka pembangunan dan mendukung kemandirian desa, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian berfokus pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Penggunaan atau pemanfaatan TIK dalam penelitian ini diartikan sebagai penggunaan/pemanfaatan TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat. Sangat penting untuk mengetahui pemanfaatan TIK di tingkat pemerintahan desa, karena desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang biasanya tertinggal dalam hal pemanfaatan TIK, dengan adanya inisiatif dari desa, studi mengenai pemanfaatan TIK di tingkat desa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Pertanyaan kehiatan ini adalah bagaimana pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Pringsewu menggunakan TIK dalam menunjang kegiatan pemerintahan, dan apa manfaat-manfaat yang diperoleh dalam penggunaan TIK tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa melalui studi di salah satu desa di Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa di Kabipaten Pringsewu yang telah memanfaatkan TIK untuk mendukung kegiatan pembangunan desa tersebut.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Governmet Bagi Aparatur Desa Kerjasama STMIK Pringsewu dan Kominfo

Kab. Pringsewu. Manfaat yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu adalah menambah pengetahuan dan kemampuan guru untuk memperluas pemahaman serta pemanfaatan Teknologi Informasi Web Government Bagi Aparatur Desa Kerjasama STMIK Pringsewu dan Kominfo Kab. Pringsewu.

II. TUNJAUAN PUSTAKA

2.1. Electronic Government

(Indrajit, R. eko, 2002) E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. (Diskominfo, 2017) E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.(Alogatama et al., 2015), (Eviana Septiana Rachman, 2017), (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2016) e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

(Indrajit, R. E., 2005) e-government salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

2.2. Perundang-undangan Tentang E-Government

(Presiden Republik Indonesia, 2003) Pengembangan e-Government di setiap instansi harus selaras dengan regulasi. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, e-Government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. "Pengembangan e-Government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur yang dibuat berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003. Pada Inpres ini berfokus kepada kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government. E-government didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan E-service dapat mewujudkan e-government yang akhirnya bermuara kepada *Good Governance*.

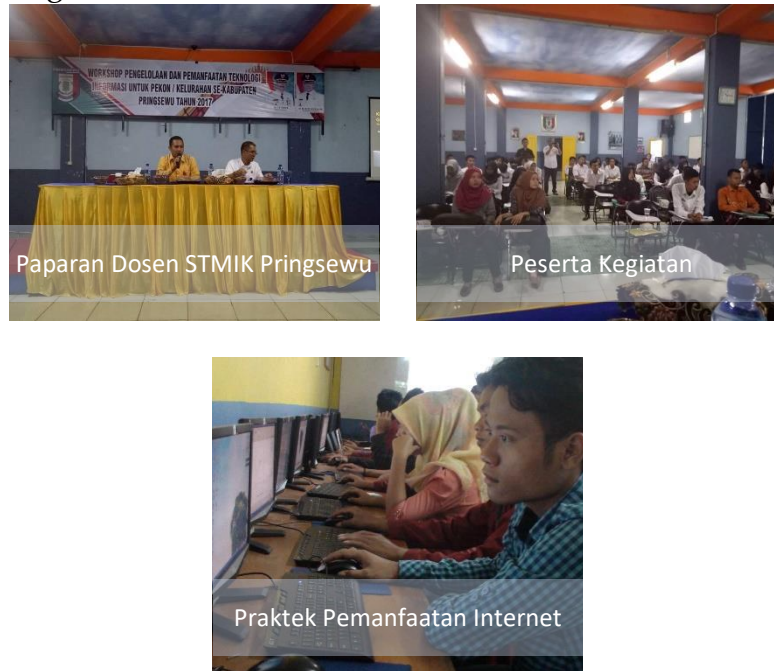
2.3. Sistem Informasi Desa

(Rozi et al., 2017) Sistem Informasi Desa memudahkan Desa menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif Desa, menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang berbasis data detail dan riil, mengarahkan kerja Pembangunan Desa secara sistematis, terukur, terarah, berkelanjutan, serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan kewargaan dan kewilayahan Desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa.

III. METODE KEGIATAN

3.1. Ceramah dan Diskusi

Kegiatan pendampinga dan pelatihan manfaat e-government yang di lakukan Kominfo Kabupaten Pringsewu dengan STMIK Pringsewu dilakukan dengan dua metode diskusi dan ceramah atau paparan materi yang disampaikan oleh Narasumber dari Dosen STMIK Pringsewu dan Perwakilan dari Kominfo Kabupaten Pringsewu.



Gambar 1. Proses Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan E-Government

3.2. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pengabdian kepada masyarakat Pelatihan Pemanfaatan Internet dan Web Governmnet Bagi Aparatur Desa Kerjasama STMIK Pringsewu dan Kominfo Kab. Pringsewu” dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2017 di Aula STMIK Pringsewu. Para peserta sudah berkumpul pukul 08.30 WIB dan mulai melakukan registrasi. Acara dimulai pukul 09.30 dengan dibuka oleh Perwakilan Dinas Kominfo Pringsewu. Penyampaian materi pertama dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat dengan topik pengembangan pemanfaatan teknologi E-Government Berbasis web. Pemaparan materi pertama dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB yang dilanjutkan dengan tanya jawab hingga pukul 12.15 WIB Selanjutnya acara istirahat dan makan siang kepada semua peserta dan panitia selama 45 menit.



Gambar 2. Paparan Materi Kebijakan E-Government

Acara dilanjutkan pukul 13.00 WIB untuk pemaparan materi kedua tentang teknik/cara pemanfaatan internet sebagai sarana pengembangan sistem pelayanan publik. Materi disampaikan oleh Tim pengabdian yang diikuti dengan antusias oleh peserta. Pemaparan materi kedua berakhir pukul 15.00 WIB dan dilanjutkan dengan tanya jawab hingga pukul 15.45 WIB. Acara ditutup pukul 16.00 WIB yang diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan oleh perwakilan aparaturnya kepada Tim Pengabdian.



Gambar 3. Peserta Pelatihan dari Pekon/Desa Se-Kabupaten Pringsewu

IV. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan menganalisis dari hasil pelatihan e-government yang telah dilakukan, aparat pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu, nampak selama mengikuti pelatihan mereka sangat antusias, hal tersebut nampak dari sambutan dan berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada fasilitator. Kondisi demikian menjadikan hangat dan hidupnya selama

berlangsungnya pelatihan. Dari sejumlah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh fasilitator, para peserta merasa lebih paham dan mampu dalam mengaplikasikan materi dalam praktek di komputer yang disediakan oleh Lab STMIK Prinsewu.

Dalam kegiatan pelatihan ini tidak hanya memamparkan materi mengenai tatakelola e-government yang baik namun juga kita kembangkan kearah informasi public yaitu pemanfaatan website desa. Untuk kegiatan lanjutan tim PkM STMIK Pringsewu dengan Kominfo Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk pengembangan website desa.

V. KESIMPULAN

Pelatihan e-government bagi masyarakat dan aparatur Pekon termasuk peningkatan komunikasi antara warga dan pemerintah. Pengelolaan infrastruktur terutama peningkatan sumberdaya Manusia akan memberikan dampak pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, manfaat e-government bagi masyarakat jelas terbukti sangat membantu dalam meningkatkan layanan terutama layanan desa di wilayah Kabupaten Pringsewu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alogatama, B. A., Nurhadryani, Y., & Komputer, I. (2015). Local E-Government : Sistem Pelayanan Non, 8-15.
- Diskominfo. (2017). Pengertian keuntungan kerugian e-government. diskominfo kabupaten bandung.
- Eviana Septiana Rachman, B. N. (2017). Pemanfaatan E-Government Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 8(1), 45-50.
- Indrajit, R. E. (2005). *E Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrajit, R. eko. (2002). *elektronik government* (1 ed.). yogyakarta: penerbit andi.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2016). E-Government Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi.
- Presiden Republik Indonesia. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Tentang Pengembangan E-Government (2003). <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Rozi, F., Listiawan, T., & Hasyim, Y. (2017). Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung. *JlPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 2(2), 107-112. <https://doi.org/10.29100/jlpi.v2i2.366>